

**INTEGRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN MELALUI APLIKASI SAKTI (STUDI PADA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT)**

Rita Hariani¹, Afridian Wirahadi Ahmad^{2*}, Amy Fontanella³
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Indonesia
E-mail: afridianpadang@gmail.com

Abstract

This research aims to see the impact on the use of the SAKTI application on the West Sumatra Province BPKP Representative as well as reviewing how the internal control system practices for the application so that it can provide good integration in the preparation of accountability reports and financial reports. The qualitative approach is the approach used in this research. There are several sources who are the core informants in this research, namely parties who directly use the SAKTI application for each module. The data collection process in this research used interviews, document reviews, and documentation related to the SAKTI application. The research results show that using the SAKTI application makes it very easy for BPKP representatives of West Sumatra Province to make accountability reports and financial reports. Apart from that, since the existence of the magic application, the internal control system over finances has become better.

Keywords: SAKTI, BPKP, Qualitative

Pendahuluan

Dewasa ini semakin banyak tuntutan yang tidak dapat dihindari khususnya tuntutan dalam kemajuan ekonomi. Tuntutan dalam era globalisasi ini memang sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah, karena dalam memajukan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan perusahaan swasta ataupun investor asing akan tetapi, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kemajuan ekonomi di suatu negara. Banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah untuk menciptakan tingkat kemajuan ekonomi yang signifikan. Semua aktivitas yang terjadi didalam sebuah instansi pemerintahan menjadi perhatian penting

terutama dalam kegiatan pengelolaan keuangan didalamnya.

Setiap kegiatan pengelolaan keuangan pasti memerlukan sistem akuntansi didalamnya bukan hanya perusahaan saja akan tetapi, pemerintah juga memiliki sistem akuntansinya sendiri. Tujuan penggunaan sistem akuntansi pemerintahan berbeda dengan perusahaan pada umumnya, karena Instansi Pemerintahan disini tidak menggunakan sistem akuntansi untuk memperhitungan keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh akan tetapi, sistem akuntansi didalam sebuah Instansi Pemerintah diharapkan dapat menjadi pengatur dan pengendali seluruh kegiatan pengelolaan keuangan. Sistem akuntansi didalam Instansi Pemerintahan diharapkan dapat berjalan

efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Seiring dengan perkembangan zaman salah satu alat sistem akuntansi yang digunakan juga akan semakin canggih. Tidak hanya untuk perusahaan asing atau swasta namun juga untuk sektor pemerintahan. Dalam era ini sistem akuntansi sudah maju dengan sangat pesat salah satu yang sering ditemui yaitu sistem akuntansi berbasis aplikasi ataupun web yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun hanya dengan bantuan internet. Sebagai suatu upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi dimasa kini semua proses pengelolaan keuangan, pencairan dana, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban, penyimpanan dan pencatatan atas pengelolaan keuangan negara sudah tidak lagi dilakukan secara manual akan tetapi dalam era ini semua sudah menggunakan sistem akuntansi berbasis aplikasi.

Sebagaimana sistem informasi telah dikembangkan dan dimanfaatkan di berbagai sektor privat, Pemerintah Indonesia pun menyadari bahwa Sistem Informasi memegang peranan yang penting dalam mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Oleh karenanya, pemerintah berupaya menyelaraskan layanan publik terhadap kemajuan teknologi dalam bentuk penerapan layanan elektronik atau yang biasa disebut sebagai *E-Government*.

Penerapan *e-government* di Indonesia, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan negara, salah satunya terwujud dalam bentuk *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS). Tujuan dari implementasi IFMIS antara lain ialah untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat penggunaan sistem manual atau sistem yang terpisah-pisah dalam pengelolaan anggaran dan proses akuntansinya. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi ketidakandalan dan keterlambatan data pendapatan dan belanja dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaporan anggaran serta pengendalian belanja yang berdampak buruk pada pengelolaan anggaran secara keseluruhan.

Perubahan dan perbaikan sistem administrasi pemerintahan melalui

pemanfaatan teknologi kini bukan hanya merupakan suatu kebutuhan, melainkan telah menjadi sebuah tuntutan. Digitalisasi pengelolaan pada sektor publik tidak lagi hanya didasarkan pada pencapaian efektifitas, efisiensi, serta pengurangan biaya saja tetapi telah beranjak menjadi sebuah tuntutan dari masyarakat penerima layanan. Sebagai suatu upaya untuk memenuhi tuntutan tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan, telah mengembangkan suatu sistem aplikasi terintegrasi yang diperuntukkan bagi seluruh satuan kerja (satker) instansi pemerintah pusat di seluruh Indonesia yang diberi nama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

SAKTI merupakan proyek berskala nasional yang menghabiskan biaya, waktu, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit. Oleh karenanya, Keberhasilan penerapan SAKTI merupakan salah satu prioritas utama dalam inisiatif strategis DJPb, Kementerian Keuangan. Implementasi SAKTI, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 223/PMK.05/2015 dan nomor 131/PMK.05/2016, diawali dengan tahapan uji coba terbatas (*piloting*) mulai tahun 2015 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.05/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang perubahan atas PMK-159/PMK.05/2018 tanggal 14 Des 2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* SAKTI.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan sebuah aplikasi sebagai bagian IFMIS yang digunakan secara mandatory oleh instansi/satuan kerja pengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dalam lingkup Kementerian/Lembaga maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah. Sistem ini dibangun guna mendukung prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, terintegrasi dan berbasis kinerja. Fitur utama SAKTI antara lain ialah integrasi basis data dan *Integration Layer* yang memungkinkan komunikasi dengan sistem lainnya (*internal* Kemenkeu, perbankan, *market-place*, dan *internal K/L*), *single entry point* sehingga dapat menghilangkan redudansi transaksi dan human error atas transaksi yang

sama, menerapkan akuntansi berbasis akrual, dan jaminan keamanan data.

Landasan Teori

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Menurut PMK No 238/PMK.05/2011 pasal 1 Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara)

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pegeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Dasar Hukum dari LPJ Bendahara adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Aplikasi SAKTI

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada instansi pemerintah meliputi 9 modul, yaitu: Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, Modul Administrasi, serta Modul Akuntansi dan Modul Pelaporan. Aplikasi ini mengintegrasikan seluruh aplikasi satuan kerja pada lingkup Kementerian Keuangan, sehingga memudahkan dalam melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban anggaran dengan menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan pelaporan pada suatu satuan kerja secara elektronik.

Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan teknik studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tulisan maupun lisan dari orang dan pelaku yang dapat memberikan informasi secara langsung yang diperlukan oleh pihak peneliti. Menurut Sutikno & Hadisaputra (2020) penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditringulasi, disimpulkan dan juga diverifikasi. Penelitian ini akan berfokus untuk melihat bagaimana dampak dari penerapan aplikasi SAKTI pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dan Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas aplikasi tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data-data dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara langsung. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai efektivitas penggunaan sistem aplikasi terintegrasi dalam pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara di BPKP Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui kendala serta evaluasi terhadap penggunaan sistem aplikasi terintegrasi dalam pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara di BPKP Provinsi Sumatera Barat

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Menurut Sugiarto (2022) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalkan lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati secara mendalam serta mencari informasi-informasi yang mendetail. Dalam analisis situasi sosial untuk kepentingan penelitian, peneliti akan melakukan penggalan

data di BPKP Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan beberapa informan terkait yaitu:

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 2) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
- 3) Bendahara Pengeluaran
- 4) Admin
- 5) Operator Komitmen
- 6) Anggaran

Hasil dan Pembahasan

A. Temuan Penelitian

Dampak atas Penerapan Aplikasi SAKTI pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran.

Selain itu, SAKTI menerapkan konsep *single database*. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem *single entry point, single database*, dan akuntansi berbasis akrual. Modul dalam aplikasi SAKTI Modul Penganggaran; Modul Komitmen; Modul Pembayaran; Modul Bendahara; Modul Persediaan; Modul Aset Tetap; Modul Pelaporan; Modul Administrator.

Adanya aplikasi SAKTI memberikan kemudahan kepada satker dalam melakukan pekerjaan sehingga mempercepat proses pengerjaan laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan dari satuan kerja (satker) dalam hal ini Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Aplikasi sakti juga telah terintegrasi semua modul dalam satu sistem sehingga semakin memberikan kemudahan kepada pengguna. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu

Mareta Fitri selaku bendahara sekaligus yang menjadi operator untuk modul anggaran:

"Kalau untuk perbedaan, sangat berbeda karena sebelumnya kita menggunakan aplikasi yang namanya sas dimana aplikasi itu tidak terintegrasi untuk semua modul dan sakti sudah terintegrasi dan nyambung dengan aplikasi KPPN yaitu SPAN"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa SAKTI merupakan aplikasi yang sudah terintegrasi dalam hal penyusunan laporan keuangan untuk satker khususnya Perwakilan BPKP Sumatera Barat. Terintegrasinya sistem yang ada pada aplikasi SAKTI untuk berbagai macam modul membuat satu orang user bisa bertanggung jawab atas beberapa modul seperti halnya yang dipegang oleh bendahara diantaranya adalah modul bendahara, anggaran, dan pembayaran. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Mareta Fitri selaku bendahara pada BPKP Provinsi Sumatera Barat:

"Ketiga modul tersebut teintegrasi untuk satu user, sehingga memberikan kemudahan bagi kami untuk mengontrol setiap modul. Dan hal seperti ini tidak bisa dilakukan pada aplikasi sebelumnya yang disediakan oleh Kementerian Keuangan"

Dalam implementasi SAKTI ini sendiri tentunya akan memunculkan suatu resiko atau kendala yang dihadapi oleh *user* yang bertanggung jawab atas suatu modul sehingga bisa menyebabkan adanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa memperumit pekerjaan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Mareta Fitri selaku bendahara pada BPKP Provinsi Sumatera Barat yang menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi justru lebih ke deadline waktu yang singkat dan jarak waktu antara instruksi dari pusat. Berikut ini merupakan kutipan wawancara bersama Bendahara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat:

"Untuk kendala, di pembagian waktu karena kadang saat saya mengerjakan tugas sebagai bendahara untuk tugas sebagai pegang anggaran pun juga ada jadi keduanya harus dikejar bersamaan. Untuk modul anggaran itu biasanya mendesak terus, karena kita menunggu instruksi dari pusat kadang deadlinenya 2 hari setelah surat terbit. kendalanya lebih ke pembagian waktu aja sih"

Meskipun terdapat kendala dalam hal *deadline* tapi adanya aplikasi SAKTI sangat mempermudah pekerjaan dari Bendahara karena lebih bisa memberikan kemudahan dalam hal rekonsiliasi karena sudah bisa dilakukan *by system*. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bendahara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat:

"Sangat mempermudah ya dan saya pun saya menjabat sebagai bendahara itu pada saat sakti sudah diterapkan jadi saya tidak pengalaman untuk aplikasi sebelumnya tapi kalau mendengar cerita bendahara sebelumnya kalau sakti lebih mudah kita tinggal merekon antara bank dengan saldo di sakti kita tidak harus rekon secara manual karena itu sudah terintegrasi semua dengan KPPN"

Walaupun dalam implementasi SAKTI ini memberikan kemudahan untuk melakukan pekerjaan yang sudah *by system*, tapi Bendahara juga membuat input secara manual yang berfungsi sebagai kontrol sehingga apabila terdapat selisih nantinya bisa disesuaikan dengan hitungan manual yang telah dilakukan.

Modul bendahara dalam proses integrasi transaksi menjadi Laporan Pertanggungjawaban harus melalui beberapa proses yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum diinput ke Aplikasi SAKTI. Berikut ini merupakan proses yang harus dilakukan pada modul bendahara sehingga bisa menjadi laporan pertanggungjawaban seperti kutipan hasil wawancara bersama Bendahara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat:

"Pertama saya menerima berkas spj yg hardcopy dan saya cocokkan dengan spby yang ada di sakti dan telah dicatat oleh verifikatur. Nah kalau cocok saya akan memproses jadi kwintansi. Kedua, Setelah menjadi kwintansi itu saya akan membuat daftar DRPP dari daftar tersebut akan terbentuk spp. Ketiga, dari SPP akan terbentuk menjadi SPM. Keempat, setelah SPM akan diproses dan dikirim ke KPPN. biasanya diproses langsung pada hari itu juga dan uang up itu akan masuk siang, namun jika saya input siang maka terbit SP2D nya itu keesokkan harinya. Kelima, apabila sudah terbit SP2D saya akan melakukan pencatatam SP2D. maka setelah itu akan saya cata uang masuk dan itu lah rutinitas yang saya lakukan apabila sudah mencukupi 50% dari UP maka akan saya lakukan GUP. Keenam diakhir bulan akan saya buat LPJ. LPJ itu itu awal bulan berikutnya dengan cara mencocokkan saldo pada sakti dengan saldo di rekening bendahara apabila sudah cocok akan saya buat LPj pada menu bendahara dan laporan bendahara pengeluaran di sakti dan baru saya kirim ke KPPN"

Melalui proses yang telah dijelaskan oleh Bendahara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dapat diketahui bahwa untuk bisa mengintegrasikan laporan pertanggungjawaban ke SAKTI dibutuhkan beberapa proses manual yang memang harus dilaksanakan terlebih dahulu, hanya saja dengan adanya sakti proses-proses tersebut terasa lebih mudah untuk dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban sendiri nantinya akan terintegrasi pada aplikasi lain yaitu SPRIN yang merupakan aplikasi yang juga dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Selain SPRIN, juga terdapat modul penganggaran yang juga memiliki aplikasi tersendiri yaitu RKKL yang berfungsi untuk mendukung proses penganggaran dan semenjak adanya aplikasi SAKTI modul penganggaran lebih terintegrasi karena melalui SAKTI *user* hanya perlu memonitoring proses penganggaran pada SAKTI tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan yang

disampaikan oleh Bendahara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat:

"Ada aplikasi tersendiri namanya RKKL. proses pengerjaannya langsung di aplikasi itu berbentuk desktop itu, nanti melalui aplikasi itu dan setiap ada penyusunan anggaran kita antar ke kanwil adk sama hardcopy nya. Setelah sakti kita sudah by aplikasi semua dan tinggal monitoring di aplikasi"

Semua modul tentu memiliki proses masing-masing pada aplikasi SAKTI, berikut ini merupakan proses penganggaran pada aplikasi SAKTI berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Bendahara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat:

" Pertama, kami mendapatkan pagu indikatif dari kantor pusat BPKP. Kedua, dari pagu tersebut kami akan menyusun RAB. Ketiga, dari RAB disusun secara rinci dan sesuai kantor pusat dan diinput ke SAKTI. Keempat, setelah diinput pada sakti akan diproses lebih lanjut oleh kantor pusat bpkp. Sedangkan untuk revisi ada dua caranya: satu, diproses oleh satker dengan cara langsung mengupload dan kirim ke kanwil sedangkan kalo diproses oleh pusat satker hanya upload lalu di approve abis itu akan dikirim kdja itu lewat kantor pusat"

Secara keseluruhan jika dilihat dari modul bendahara, anggaran, dan pembayaran aplikasi SAKTI sangat mempermudah pekerjaan satuan kerja khususnya Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat karena sistem dari aplikasi tersebut sudah sangat terintegrasi sehingga bisa memberikan kemudahan kepada user dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban sehingga hal tersebut bisa menjadi keunggulan tersendiri. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bendahara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat:

"Semua sudah terintegrasi, sehingga kemenkeu mudah memonitoring apa

saja yang dilakukan oleh satker mulai dari anggaran, transaksi belanja sampai ke pelaporannya. Kemudian juga sudah by sistem semua dan mempersingkat waktu dalam proses pengerjaan".

Selain pendapat dari Bendahara tersebut, juga terdapat pendapat dari Bapak Arianto selaku Kepala Bagian Umum dan selaku PPK yang menyampaikan bahwa penerapan aplikasi SAKTI sudah bisa memenuhi kebutuhan dari satker khususnya perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat karena SAKTI mampu mempercepat proses pengerjaan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang selama ini belum integrasi satu sama lain. Melalui Aplikasi SAKTI juga proses pembuatan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban sudah terlaksana secara runut dan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pengerjaannya. Berikut ini kutipan wawancara bersama Bapak Arianto selaku Kepala Bagian Umum dan selaku PPK:

" Bagi saya lebih mempercepat, selama ini proses untuk menyusun laporan keuangan yaitu 3 aplikasi simak, persediaan, saiba, irekon. itu sangat merepotkan waktu itu, karena kita harus kirim adk dulu terus digabung terus baru ke saiba setelah itu baru kirim kppn dan kalau salah ulang lagi. Setelah ada irekon kita ga perlu ke kppn lagi, tapi itupun ternyata kadang salah juga karena kita masih ngambil adk dari simak. Setelah adanya sakti yang sudah satu aplikasi meskipun banyak modul ee menurut saya masalah yang dihadapi seperti rekon sudah tidak susah lagi, namun di level transaksi harus hati-hati dan runut. seperti di modul komitmen kita nyatat barang itu bisa belakangan, tapi kalo di sakti ga bisa kalo kita belum input di modul komitmen kita gabisa lanjut ke modul keuangan atau pembayaran. Nah dengan adanya sakti ini kita jadi lebih tertib, menjadi lebih teratur, dan sinkronisasi jadi terjamin. Meskipun kita bekerja jadi harus lebih terstruktur mungkin itu yang saya

rasakan karena ga perlu banyak kontrol ke beda2 aplikasi sehingga lebih cepat”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa SAKTI merupakan sistem yang sangat mendukung proses integrasi laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan secara keseluruhan. Aplikasi SAKTI juga banyak memberikan perubahan ke arah yang jauh lebih baik sehingga bisa meningkatkan performa dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Bapak Arianto selaku selaku Kepala Bagian Umum dan selaku PPK:

”Saya ga perlu mengontrol lagi, karena setiap stepnya sudah sesuai alur jadi saya yakin sudah sesuai prosedur. Terus keyakinan akan output itu jadi lebih yakin sebagai ppk. Semenjak ada sakti juga opini laporannya jadi meningkat seperti banyak instansi yg memperoleh WTP dan banyak yg sudah tepat waktu pelaporannya tercermin saat kita melakukan rekon. Sebelum ada sakti saat rekon itu selalu ada unit yang tidak selesai rekon dan kalau sekarang udah cepat dalam pengiriman data”.

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi SAKTI pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mampu meningkatkan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya sudah dilaksanakan secara baik dan benar. Adanya peningkatan opini tersebut semakin menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SAKTI sangatlah tepat.

Tentunya baiknya suatu aplikasi, masih terdapat harapan lebih dari berbagai pihak terkait Aplikasi SAKTI sendiri seperti yang disampaikan oleh Bapak Arief Karna selaku Analis Pengelola Keuangan APBN Muda dan Subkoordinator Keuangan:

”Sejauh ini sudah cukup baik, karena dari segi pelaporan keuangan yang menjadi output dari aplikasi sakti ini sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, sudah bisa menyajikan

informasi yang lengkap seperti buku besar, jurnal setiap transaksi. Berbeda dengan dahulu, untuk saiba dan simak dari segi implementasi SAP berbasis akrual masih kurang karena kita juga butuh melakukan jurnal manual dan disakti sudah lengkap tanpa harus proses manual dan bisa dimonitor dan tracer secara keseluruhan. untuk harapan sendiri, terkadang troubleshoot data bisa diatasi oleh kppn atau kemenkeu dengan menyediakan menu-menu yang bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan trouble tersebut atau ada sebuah panduan (FAQ) yang bisa dijadikan panduan untuk mengatasi permasalahan yang muncul khususnya dari segi aplikasi. So far sudah bagus sih mungkin bakal ada penyesuaian kedepannya.”.

Sistem Pengendalian Internal Atas Penggunaan SAKTI pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Penggunaan aplikasi dalam pengelolaan data yang dimiliki oleh suatu instansi tentunya harus diiringin dengan internal control dari instansi itu sendiri. Aplikasi SAKTI yang digunakan oleh satker tentunya sudah memiliki pengendalian internal yang baik dalam penggunaannya. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Arianto selaku Kepala Bagian Umum dan selaku PPK:

”Seperti yg saya bilang tadi jdi lebih terstruktur dan sistem pembagian kerja jadi lebih berjalan, pembagian hak user dan rules masing2 user lebih jelas. mungkin masih ada penggunaan akun itu masih didelegasikan tapi itu untuk kelancaran jadi diperlukan kita laksanakan itu tapi seharusnya itu bisa kita hindari kalo itu bisa terlibat”.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Arianto tersebut terlihat bahwa SAKTI merupakan sistem yang sudah terstruktur dan memiliki sistem pembagian kerja yang jelas sehingga bisa pembagian tugas untuk setiap user bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga setiap user sudah memiliki *rules* yang jelas baik dari segi penggunaan maupun cara pengerjaan tugas mereka masing-masing. Hal ini juga sejalan dengan wawancara yang dilakukan bersama Bendahara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat:

"Pengendalian internal dari penggunaan aplikasi SAKTI ini cukup baik ya, karena setiap transaksi harus memiliki kode OTP dari pihak PPK dan sudah memiliki sistem pembagian tugas yang jelas antara setiap user, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam melakukan pekerjaan".

Pendapat tersebut juga sejalan dengan *statement* yang disampaikan oleh Bapak Arief Karna selaku Analis Pengelola Keuangan APBN Muda dan Subkoordinator Keuangan yang menyampaikan secara *detail* bahwa sudah terdapat pemisahan fungsi yang sangat baik dalam Aplikasi SAKTI dan juga SAKTI sendiri sudah terintegrasi dari proses penginputan sampai menjadi laporan sehingga bisa mengurangi *human error* dalam proses pembuatan laporan. Berikut merupakan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Arief Karna selaku Analis Pengelola Keuangan APBN Muda dan Subkoordinator Keuangan:

"Menurut saya sakti ini sudah terdapat spi yang baik. pertama, sudah ada pemisahan fungsi yang jelas seperti operator penganggaran, operator komitmen, operator pembayaran, pelaporan dan mempunyai user masing2 untuk setiap staff. kedua, sakti terintegrasi sehingga seluruh transaksi yang diinput akan menjadi laporan sehingga tidak ada miss disana. Setiap proses itu angkanya akan otomatis jadi laporan berbeda dengan manual yg masih ada kemungkinan human error yang menyebabkan lapkeu tidak benar. Ketiga, banyak fitur otomatisasi di sakti dengan kita menginput transaksi maka

kita bisa menarik data tanpa menginput ulang dan terakhir ada pengelolaan bnm ada penginputan yang berkaitan dengan aset yang nantinya otomatis akan terinput ke laporan seperti neraca, LO, LPE".

Berdasarkan pendapat dari 3 narasumber tersebut terlihat jelas bahwa penggunaan aplikasi SAKTI sudah sangat tepat, mengingat sistem pengendalian internal dari aplikasi SAKTI sendiri sudah sangat baik sehingga layak untuk digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Sistem pengendalian internal sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan sebelum mengadopsi suatu aplikasi dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini Kementerian Keuangan sudah sangat baik dalam merancang aplikasi ini sehingga bisa mempermudah pekerjaan *satker* khususnya perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Apabila suatu sistem pengendalian internal sudah dirancang dengan baik, maka akan kecil kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban serta bisa menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang fatal dalam proses pengerjaannya.

B. Diskusi dan Analisis

Aplikasi SAKTI Menjadi Solusi dalam Integrasi Laporan Pertanggungjawaban dan Mampu Meningkatkan Produktivitas

Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan sistem SAKTI menyebutkan bahwa Sistem ini mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja. Selain itu juga, Peraturan Menteri Keuangan tersebut bertujuan untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Efisiensi dalam pekerjaan merupakan hal yang sangat penting mengingat adanya keterbatasan waktu dalam suatu pekerjaan

sehingga dibutuhkan sistem yang bisa memberikan kemudahan untuk mengatasi hal tersebut. Aplikasi SAKTI merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan efisiensi dalam pekerjaan penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Selain bisa memperoleh efisiensi dalam pekerjaan, aplikasi SAKTI juga mampu meningkatkan proses integrasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Mengingat integrasi dalam laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung terciptanya transparansi yang baik dalam proses penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban.

Pelaksanaan integrasi atas proses penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan melalui pembagian modul yang harus dipegang oleh user yang berbeda untuk setiap modulnya. Dalam penyusunannya sendiri tidak boleh ada sistem yang didahului, artinya semua sistem yang dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan keuangan harus dilaksanakan secara runut dan benar.

Kepala Bagian Umum Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa Aplikasi SAKTI sangat mempercepat proses pengerjaan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Mengingat aplikasi SAKTI sendiri sudah terintegrasi antar modulnya sehingga dalam implementasinya bisa dilaksanakan secara runut dan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain itu juga dengan adanya aplikasi ini penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban dilaksanakan dengan lebih tertib sehingga lebih rapi.

Harapannya dengan adanya aplikasi SAKTI ini penyusunan laporan keuangan bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi, karena aplikasi SAKTI sendiri sudah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sehingga dalam penyajiannya sendiri bisa dilaksanakan dengan baik. Namun tentunya masih dibutuhkan perbaikan yang lebih baik lagi kedepannya agar aplikasi ini menjadi lebih prima seperti proses *maintenance* yang harus bisa dilakukan dengan cepat sehingga bisa mengurangi resiko adanya

keterlambatan dalam proses pelaporan keuangan.

Aplikasi SAKTI Mampu Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal dalam Proses Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, dengan demikian pengertian sistem pengendalian internal tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah sistem informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer (Mulyadi, 2011).

Sistem pengendalian internal dapat mempunyai beberapa pengertian, yaitu sistem pengendalian internal dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, istilah tersebut sama dengan pengertian internal check yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi seperti misalnya mencocokkan penjumlahan mendatar (*horizontal*) dengan penjumlahan melurus (*vertikal*). Sedangkan dalam arti yang luas, sistem pengendalian internal dapat dipandang sebagai sistem sosial yang mempunyai wawasan/makna khusus yang berada dalam organisasi (Eprilsa & Budiwitjaksono, 2022).

Sistem pengendalian internal yang baik harus mempunyai struktur pengendalian internal yang baik pula, yaitu harus mempunyai prosedur dan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas disini dimaksudkan bahwa struktur pengendalian internal suatu instansi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk memberikan cukup kepastian akan sasaran dan tujuan perusahaan yang akan dicapai. Aplikasi SAKTI merupakan salah satu aplikasi yang dirancang dan dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang baik mengingat dalam SAKTI sendiri sudah terdapat sistem pembagian kerja yang jelas antar setiap *user* sehingga tidak

ada tumpang tindih dalam proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Selain itu juga, aplikasi SAKTI juga sudah memiliki keamanan berupa OTP dalam penggunaannya yang diberikan langsung oleh PPK sehingga tidak bisa diakses oleh orang asing yang berniat untuk melakukan peretasan data.

Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda dan Subkoordinator Keuangan perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat berpendapat bahwa sistem pengendalian internal dari Aplikasi SAKTI sudah sangat baik. Hal ini dikarenakan adanya pemindahan fungsi yang jelas untuk setiap *user*. Selain itu juga, proses penginputan transaksi sudah terintegrasi satu sama lain sehingga mempercepat penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Selain itu juga terdapat keamanan berupa OTP dalam penggunaan aplikasi SAKTI sehingga secara keseluruhan Aplikasi SAKTI sudah sangat baik dalam hal sistem pengendalian internal. Aplikasi SAKTI juga sudah sesuai dengan kebutuhan dari *satker* khususnya Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan terdapat beberapa kesimpulan terkait integrasi pengelolaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi SAKTI sebagai berikut:

- 1) Secara keseluruhan aplikasi SAKTI sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Selain itu integrasi dalam proses penyusunan laporan keuangan terlaksana dengan sangat baik sehingga bisa mempercepat proses penyusunan laporan keuangan dan juga bisa memberikan kemudahan kepada *user* dalam implementasinya.
- 2) Aplikasi SAKTI sudah dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang baik dibuktikan dengan adanya sistem pembagian fungsi yang jelas dalam aplikasi tersebut. Kemudian juga terdapat keamanan berupa kode OTP

yang harus didapat langsung melalui PPK sehingga bisa mengurangi kemungkinan adanya pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Setelah melakukan beberapa pengamatan tentang integrasi pengelolaan keuangan dan laporan keuangan melalui aplikasi SAKTI pada perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, peneliti dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- 1) Perlunya peningkatan sinyal untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh user dalam proses penyusunan laporan keuangan melalui Aplikasi SAKTI. Walaupun kendala lebih sering muncul dari pusat terkait maintenance, namun pihak BPKP Sumatera Barat harus melakukan tindakan preventif untuk mengatasi hal tersebut dengan menyediakan sinyal yang lebih baik lagi sehingga jika sistem normal proses input data bisa dilaksanakan lebih cepat lagi.
- 2) Bagi peneliti berikutnya, diharapkan mampu untuk bisa mengembangkan lagi penelitian ini dengan cara melihat bagaimana integrasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi SAKTI pada satker lain yang juga menggunakannya.

Daftar Referensi

- Andriani, W. (2023). Factors Influencing Local Government Financial Performance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 951-959. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.3094>
- Andriani, W., Rosalina, E., Sriyuniati, F., Afrizon, F., & Aprilia, D. (2023). Perancangan Database Akuntansi Menggunakan Microsoft Access Pada Usaha Konveksi Taylor Abadi. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 9(1), 30-36. <https://doi.org/10.22216/jsi.v4i1>
- Anwar, A. I., & Hadi, M. (2022). Implementasi Aplikasi SAKTI dan SPAN Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Informatika*, 1(2), 32-55.

<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JI/article/view/574>

Eprilsa, S. D., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 748-757. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4216>

Hendriksen, E. S., & Van Breda, M. F. (2000). Teori Akuntansi. In L. Saputra (Ed.), *Edisi Kelima. Buku Kesatu. Batam Centre: Interaksara* (1st ed.). Interaksara - Southern Methodist University.

Ismail, M. R. N. H., & Sasmito Jati Utama. (2022). Penerapan SAKTI dalam Sistem Informasi Akuntansi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 25(2), 102-109. <https://doi.org/10.30649/aamama.v25i2.144>

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAQBAJ>

Mukhtaromin. (2018). Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 588-602.

Mulyadi. (2011). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat.

Nasution, R. N. A., & Nasution, J. (2022). Penerapan Aplikasi Sakti Dalam Pengelolaan Keuangan Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera. *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, 3(1), 5-8. <https://doi.org/10.29303/alexandria.v3i1.172>

Nurhakim, I., & Yudianto, I. (2018). Implementation of Village Fund Management. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(2), 39-55. <https://doi.org/10.24198/jaab.v1i2.18346>

Oliyan, F., Santi, E., & Rosalina, E. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan dan Perancangan Aplikasi Keuangan Untuk Usaha Kecil Menengah Studi Kasus pada D'Haus Cake. *Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 90-96. <https://doi.org/10.30630/jam.v15i2.19>

Pambudi, Y. A., Safuan, & Alhabshy, M. A. (2022). Implementasi Penggunaan Aplikasi SAKTI Pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. *Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6723-6729.

Pemerintah RI. (2014). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuaan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.05/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang perubahan atas PMK-159/PMK.05/2018 tanggal 14 Des 2018 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI.

Prabowo, N. T. (2017). Analisis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan Pendekatan Technology Acceptance Model. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 55-66. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.27>

Putra, I. P. Y. (2022). Implementasi pembukuan oleh bendahara pengeluaran dengan penggunaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. *Journal Industrial Servicess*, 8(1), 88. <https://doi.org/10.36055/jiss.v8i1.14570>

Raharjo, E. (2015). Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Enterprise Risk Management*, 31-41. https://doi.org/10.46799/jurnal_syntaxtransformation.v1i8.123

Rahman, S., Hartanto, S., & Harkat, A. (2021). Analisis Implementasi Sistem Aplikasi

Keuangan Tingkat Instansi (Sakti). *Aseri: Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 3(1), 64–72.

<https://doi.org/10.25047/asersi.v3i1.3901>

Saputri, R. R., Chandra, N., & ... (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pengguna pada E-Commerce (Studi Kasus Mahasiswa Politeknik Negeri Padang). *Jurnal Akuntansi, Bisnis ..., 1(1)*, 1–7. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei/index.php/jabei/article/view/2%0Ahttps://akuntansi.pnp.ac.id/jabei/index.php/jabei/article/download/2/1>

Sofia, G., Afni, Z., & Andriani, W. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Nagari Aia Manggih periode 2018-2022). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1172–1181. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1390>

Sugiarto. (2022). *Metodologi Penelitian Bisnis - Prof. Dr. Ir. Sugiarto, M.Sc.* Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=qTpcEAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

Sutikno, M. S., & Hadisaputra, P. (2020). *Penelitian Kualitatif: Mengurai Seputar APA dan Bagaimana CARA PRAKTIS Menulis dan Melakukan Penelitian Kualitatif Secara Benar Dari A sampai Z* (Nurlaeli (ed.); 1st ed., Vol. 1, Issue April). Lombok: Holistica Lombok.

Tatu, M. A. C., & Rafael, S. J. M. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 53–61. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3969>

Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 23 tentang Keuangan

Wibowo, S. H., S. W., Permana, A. A., Sembiring, S., Wahidin, A. J., Nugroho, J. W., Rahajeng, E., Kurnaedi, D., Bau, R. T. R. L., & Adhicandra, I. (2023). *Teknologi Digital Di Era Modern*. Jakarta: Global Eksekutif Teknologi. <https://books.google.co.id/books?id=j0m5EAAAQBAJ>